

## BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1 Deskripsi Data

#### 4.1.1 Deskripsi Objek Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) mulai tahun 2013-2015. Alasan peneliti memilih perusahaan sektor tambang sebagai objek penelitian karena sektor tambang sangat berkaitan erat dengan dampak lingkungan dan sosial.

Tabel di bawah ini menyajikan tahapan seleksi sampel berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.

**Tabel 4.1 Tahapan Seleksi Kriteria Sampel**

| Kriteria Sampel  | Jumlah |
|--|--------|
| Jumlah perusahaan pertambangan yang <i>listing</i> di BEI tahun 2013-2015  | 41     |
| Dikurangi jumlah perusahaan pertambangan yang tidak menyajikan <i>annual report</i> secara periodik selama tahun 2013-2015   | (8)    |
| Dikurangi jumlah perusahaan pertambangan yang tidak menyajikan secara lengkap informasi <i>corporate governance</i> pada <i>annual report</i> selama tahun 2013-2015 | (12)   |
| Jumlah perusahaan yang memenuhi kriteria   | 21     |
| Dikali tahun pengamatan 3 tahun  | 63     |

Sumber : data sekunder yang diolah, 2017

Perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2013-2015 berjumlah 41 perusahaan. Dari 41 perusahaan

tersebut. Jumlah perusahaan pertambangan yang tidak menyajikan secara periodik *annual report* selama tahun 2013-2015 sebanyak 8 perusahaan dan Jumlah perusahaan pertambangan yang tidak menyajikan secara lengkap *corporate governance* selama tahun 2013-2015 sebanyak 12 perusahaan. Jadi, perusahaan yang dijadikan sampel adalah sebanyak 21 perusahaan, sedangkan total 3 tahun pengamatan yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 63 pengamatan. Dalam penelitian ini, sampel dipilih dengan metode *purposive sampling* dengan menggunakan kriteria yang telah ditentukan. Sampel dipilih bagi perusahaan yang menyajikan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, seperti jumlah anggota dewan komisaris, proporsi dewan komisaris independen, jumlah rapat komite audit, jumlah rapat dewan direksi, dan *governance committee*.

## **4.2 Hasil Analisis Data**

### **4.2.1 Statistik Deskriptif**

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang terlihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, *sum*, *range*, *kurtosis* dan *skewness* (kemencengan distribusi). Variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel independen dan dependen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah jumlah anggota dewan komisaris, proporsi dewan komisaris independen, ukuran komite audit, jumlah rapat dewan komisaris, jumlah rapat dewan direksi, jumlah rapat komite audit dan *governance committee*, sedangkan variabel dependennya adalah pengungkapan *sustainability report*. Berikut adalah hasil analisis data dengan statistik deskriptif :

**Tabel 4.2 Statistik Deskriptif**

|                    | N  | Minimum | Maximum | Mean  | Std. Deviation |
|--------------------|----|---------|---------|-------|----------------|
| JADK               | 63 | 2       | 10      | 5.21  | 1.851          |
| PDKI               | 63 | .25     | 1.00    | .4354 | .14614         |
| UKA                | 63 | 2       | 6       | 3.22  | .683           |
| JRDK               | 63 | 2       | 25      | 6.54  | 4.921          |
| JRDD               | 63 | 2       | 82      | 19.73 | 18.163         |
| JRKA               | 63 | 3       | 61      | 12.94 | 13.746         |
| GC                 | 63 | 0       | 1       | .25   | .439           |
| Valid N (listwise) | 63 |         |         |       |                |

Sumber : data sekunder yang diolah, 2017

Tabel 4.2.1. menunjukkan bahwa jumlah unit analisis dalam penelitian (N) adalah 63.

1. Variabel jumlah anggota dewan komisaris dari 63 sampel perusahaan yang paling rendah (minimum) adalah PT. Cakra Mineral, Tbk (CKRA) sebanyak 2 anggota dewan komisaris, sedangkan paling tinggi (maximum) adalah PT. Vale Indonesia Tbk (INCO) sebanyak 10 anggota dewan komisaris. Sedangkan nilai mean yang diperoleh dari jumlah anggota dewan komisaris sebesar 5,21 yang artinya dari 63 perusahaan yang diteliti rata-rata perusahaan pertambangan telah memiliki jumlah anggota dewan komisaris dengan standar deviasi sebesar 1,85 dan sudah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan NO.33/POJK.04/2014 pasal 20 ayat 1 yang isinya dewan komisaris paling kurang terdiri dari 2 orang anggota dewan komisaris.
2. Variabel proporsi dewan komisaris independen dari sampel perusahaan yang memiliki jumlah paling sedikit (minimum) adalah PT. Darma Henwa, Tbk (DEWA), yaitu sebesar 0.25 sedangkan proporsi dewan komisaris independen paling banyak (maksimum) adalah PT. Toba Bara Sejahtera, Tbk (TOBA) sebesar 1.00. Sedangkan nilai mean yang diperoleh dari proporsi dewan komisaris independen sebesar 0,43 yang artinya dari 63 perusahaan yang diteliti rata-rata perusahaan pertambangan telah memiliki proporsi dewan komisaris independen dengan standar deviasi sebesar 0,146 dan sudah

sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan NO.33/POJK.04/2014 bab 3, pasal 20 ayat 2 yaitu dalam hal dewan komisaris terdiri dari 2 orang anggota dewan komisaris, 1 diantaranya adalah dewan komisaris independen.

3. Variabel ukuran komite audit dari sampel perusahaan yang memiliki jumlah paling sedikit (minimum) adalah PT. Atlas Resources, Tbk (ARII), yaitu sebesar 2 sedangkan ukuran komite audit paling banyak (maksimum) adalah PT. Aneka Tambang, Tbk (ANTAM) sebesar 6. Sedangkan nilai mean yang diperoleh dari ukuran komite audit sebesar 3,22 yang artinya dari 63 perusahaan yang diteliti rata-rata perusahaan pertambangan telah memiliki ukuran komite audit dengan standar deviasi sebesar 0,68.
4. Variabel jumlah rapat dewan komisaris sampel perusahaan yang memiliki jumlah rapat paling sedikit (minimum) adalah PT. Harum Energy, Tbk (HRUM), sebanyak 2 kali rapat, sedangkan paling banyak (maksimum) adalah PT. Bukit Asam, Tbk (PTBA) sebanyak 25 kali rapat. Sedangkan nilai mean yang diperoleh dari jumlah rapat dewan komisaris sebesar 6,54 yang artinya dari 63 perusahaan yang diteliti rata-rata perusahaan pertambangan telah memiliki jumlah rapat dewan komisaris dengan standar deviasi sebesar 4,92.
5. Variabel jumlah rapat dewan direksi sampel perusahaan yang memiliki jumlah rapat paling sedikit (minimum) adalah PT. Harum Energy, Tbk (HRUM), sebanyak 2 kali rapat, sedangkan paling banyak (maksimum) adalah PT. Bukit Asam, Tbk (PTBA) sebanyak 82 kali rapat. Sedangkan nilai mean yang diperoleh dari jumlah rapat dewan direksi sebesar 19,73 yang artinya dari 63 perusahaan yang diteliti rata-rata perusahaan pertambangan telah memiliki jumlah rapat dewan direksi dengan standar deviasi sebesar 18,16.
6. Variabel jumlah rapat komite audit sampel perusahaan yang memiliki jumlah rapat paling sedikit (minimum) adalah PT. Perdana Karya Perkas, Tbk (PKPK), sebanyak 3 kali rapat, sedangkan paling banyak (maksimum) adalah PT. Timah, Tbk (TINS) sebanyak 61 kali rapat. Sedangkan nilai mean yang

diperoleh dari jumlah rapat komite audit sebesar 12,94 yang artinya dari 63 perusahaan yang diteliti rata-rata perusahaan pertambangan telah memiliki jumlah rapat komite audit dengan standar deviasi sebesar 13,74.

7. Variabel *governance committee* sampel perusahaan yang telah membentuk *governance committee* adalah 1 dan yang belum membentuk yaitu 0. Sedangkan nilai mean yang diperoleh dari variabel *governance committee* sebesar 0.25 yang artinya dari 63 perusahaan yang diteliti rata-rata perusahaan pertambangan telah membentuk *governance committee* sebesar 25% dengan standar deviasi sebesar 0.43.

#### 4.2.2 Hasil Analisis Regresi

Pada penelitian ini, hipotesis dikembangkan dengan menggunakan analisis regresi logistik. Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan program SPSS versi 20 diperoleh output regresi logistik. Tahapan dalam pengujian dengan menggunakan uji regresi logistik dapat dijelaskan sebagai berikut (Ghozali, 2011) :

Dalam penelitian ini variabel dependen (respon) Y bertipe kategorik/dua pilihan yaitu: perusahaan-perusahaan yang melakukan pengungkapan *sustainability report* (SR) dengan nilai=1 dan perusahaan-perusahaan yang tidak melakukan publikasi *sustainability report* (SR) dengan nilai=0. Keterangan ini dapat dilihat dalam tabel identifikasi data.

**Tabel 4.3 Identifikasi Data**

| Dependent Variable Encoding |                |
|-----------------------------|----------------|
| Original Value              | Internal Value |
| 0                           | 0              |
| 1                           | 1              |

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2017

Dalam penelitian ini jumlah data yang diproses sebanyak 63 atau  $N=63$ . Untuk melihat kelengkapan data yang diproses dalam penelitian ini dan tidak adanya *missing case* ditunjukkan pada tabel *Case Processing summary* :

**Tabel 4.4**  
**Case Processing Summary**

| Unweighted Cases <sup>a</sup> |                      | N  | Percent |
|-------------------------------|----------------------|----|---------|
|                               | Included in Analysis | 63 | 100.0   |
| Selected Cases                | Missing Cases        | 0  | .0      |
|                               | Total                | 63 | 100.0   |
| Unselected Cases              |                      | 0  | .0      |
| Total                         |                      | 63 | 100.0   |

#### 4.2.3 Hasil Uji Kesesuaian Keseluruhan Model (*Overall Model Fit*)

Menilai keseluruhan model (*overall model fit*) dengan menggunakan *Log Likelihood value* (nilai  $-2LL$ ), yaitu dengan cara membandingkan antara nilai  $-2LL$  pada awal (*block number* = 0), model ini hanya memasukkan konstanta dengan nilai  $-2LL$ . Pada bagian selanjutnya yaitu *Block Number* = 1, model memasukkan konstanta dan variabel *independent*. Kesimpulannya bila nilai  $-2LL$  *Block Number* = 0 > dari pada nilai *Block Number* = 1, maka menunjukkan model regresi yang baik. Nilai  $-2LL$  awal adalah sebesar 69.158. Setelah dimasukkan ketujuh variabel independen, maka nilai  $-2LL$  akhir mengalami penurunan menjadi 48,749. *Log likelihood* pada regresi logistik, mirip dengan pengertian "*Sum of Square Error*" pada model regresi, hal ini mengindikasikan penurunan nilai *log likelihood* menunjukkan model yang semakin baik atau dengan kata lain model yang dihipotesiskan fit dengan data (Ghozali, 2011).

**Table 4.5**  
Iteration History<sup>a,b,c,d</sup>

| Iteration | -2 Log likelihood | Coefficients |       |        |       |      |      |       |       |
|-----------|-------------------|--------------|-------|--------|-------|------|------|-------|-------|
|           |                   | Constant     | JADK  | PDKI   | UKA   | JRDK | JRDD | JRKA  | GC    |
| 1         | 51.570            | -1.563       | -.021 | -.599  | -.115 | .073 | .031 | -.016 | 1.448 |
| 2         | 48.912            | -2.038       | -.024 | -.901  | -.200 | .113 | .046 | -.027 | 1.980 |
| 3         | 48.751            | -2.271       | -.026 | -1.024 | -.192 | .129 | .051 | -.032 | 2.155 |
| 4         | 48.749            | -2.316       | -.027 | -1.040 | -.181 | .131 | .051 | -.033 | 2.173 |
| 5         | 48.749            | -2.317       | -.027 | -1.041 | -.181 | .131 | .051 | -.033 | 2.173 |

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2017

#### 4.2.4 Hasil Uji Koefisien Determinasi (*Nagelkerke R Square*)

Besarnya nilai koefisien determinasi pada model regresi logistik ditunjukkan oleh nilai *Nagelkerke R Square*. Nilai *Nagelkerke R Square* adalah sebesar 0,415 yang berarti variabilitas variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen adalah sebesar 41.5%, sedangkan sisanya sebesar 58.5% dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar model penelitian (Ghozali, 2011).

**Table 4.6**

| Model Summary |                     |                      |                     |
|---------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| Step          | -2 Log likelihood   | Cox & Snell R Square | Nagelkerke R Square |
| 1             | 48.749 <sup>a</sup> | .277                 | .415                |

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2017

#### 4.2.5 Hasil Uji Kelayakan Model (*Goodness Of Fit Test*)

Kelayakan model regresi dinilai dengan menggunakan *Hosmer and Lemeshow's Goodness of Fit Test*. Pengujian menunjukkan nilai *Chi-Square* sebesar 9,193 dengan signifikansi (p) sebesar 0,326. Berdasarkan hasil tersebut terlihat bahwa signifikansi di atas 0,05 yang berarti keputusan yang diambil adalah menerima  $H_0$ : tidak ada perbedaan antara klasifikasi yang diprediksi dengan

klasifikasi yang diamati. Maka model regresi ini bisa digunakan untuk analisis selanjutnya atau dengan kata lain mampu memprediksi nilai observasinya (Ghozali, 2011).

**Table 4.7**

| Hosmer and Lemeshow Test |            |    |      |
|--------------------------|------------|----|------|
| Step                     | Chi-square | Df | Sig. |
| 1                        | 9.193      | 8  | .326 |

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2017

### 4.3 Hasil Pengujian Hipotesis

Pengujian dalam penelitian ini menggunakan model regresi logistik untuk mengetahui peran dari masing-masing variabel independen yaitu jumlah anggota dewan komisaris (JDKA), proporsi dewan komisaris independen (PDKI), ukuran komite audit (UKA), jumlah rapat dewan komisaris (JRDK), jumlah rapat dewan direksi (JRDD), jumlah rapat komite audit (JRKA), dan *governance committee* (GC). Kriteria pengujian dengan tingkat kepercayaan yang digunakan adalah 95% atau taraf signifikansi 5% ( $\alpha = 0.05$ ).

**Tabel 4.8**

|                        |          | Variables in the Equation |       |       |    |      |        |                     |         |
|------------------------|----------|---------------------------|-------|-------|----|------|--------|---------------------|---------|
|                        |          | B                         | S.E.  | Wald  | Df | Sig. | Exp(B) | 95% C.I. for EXP(B) |         |
|                        |          |                           |       |       |    |      |        | Lower               | Upper   |
| Step<br>1 <sup>a</sup> | JADK     | -.027                     | .220  | .015  | 1  | .904 | .974   | .633                | 1.499   |
|                        | PDKI     | -1.041                    | 3.007 | .120  | 1  | .729 | .353   | .001                | 128.015 |
|                        | UKA      | -.181                     | .982  | .034  | 1  | .854 | .834   | .122                | 5.721   |
|                        | JRDK     | .131                      | .132  | .982  | 1  | .322 | 1.140  | .880                | 1.478   |
|                        | JRDD     | .051                      | .027  | 3.713 | 1  | .045 | 1.053  | .999                | 1.109   |
|                        | JRKA     | -.033                     | .038  | .757  | 1  | .384 | .967   | .897                | 1.043   |
|                        | GC       | 2.173                     | .828  | 6.885 | 1  | .009 | 8.783  | 1.733               | 44.518  |
|                        | Constant | -2.317                    | 2.927 | .627  | 1  | .429 | .099   |                     |         |

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2017



Berdasarkan tabel 4.3 dapat diketahui persamaan regresi logistik dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$\mathbf{SR = - 2.317 - 0.027 JADK - 1.041 PDKI - 0.181 UKA + 0.131 JRDK + 0.051 JRDD - 0.033 JRKA + 12.173 GC}$$

1. Variabel jumlah anggota dewan komisaris menunjukkan koefisien regresi negatif sebesar -0.027 artinya setiap penambahan satu akan menurunkan pengaruh jumlah anggota dewan komisaris sebesar 2.7% dengan nilai signifikansi sebesar 0.904 lebih besar dari taraf signifikansi, yaitu 5% (0,05). Maka hipotesis pertama tidak berhasil membuktikan bahwa jumlah anggota dewan komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report*.
2. Variabel proporsi dewan komisaris independen menunjukkan koefisien regresi negatif sebesar -1.041 artinya setiap penambahan satu akan menurunkan pengaruh proporsi dewan komisaris independen sebesar 104.1 % dengan nilai signifikansi sebesar 0.729 lebih besar dari taraf signifikansi, yaitu 5 % (0.05). Maka hipotesis ke-2 tidak berhasil membuktikan bahwa proporsi dewan komisaris independen berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report*.
3. Variabel ukuran komite audit menunjukkan koefisien regresi negatif sebesar -0.181 artinya setiap penambahan satu akan menurunkan pengaruh ukuran komite audit sebesar 18.1 % dengan nilai signifikansi sebesar 0.834 lebih besar dari taraf signifikansi, yaitu 5 % (0.05). Maka hipotesis ke-3 tidak berhasil membuktikan bahwa ukuran komite audit berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report*.
4. Variabel jumlah rapat dewan komisaris menunjukkan koefisien regresi positif sebesar 0.131 artinya setiap penambahan satu akan menaikkan pengaruh jumlah rapat dewan komisaris sebesar 13.1 % dengan nilai signifikansi sebesar 0.322 lebih besar dari taraf signifikansi, yaitu 5% (0.05). Maka

- hipotesis ke-4 tidak berhasil membuktikan bahwa jumlah rapat dewan komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report*.
5. Variabel jumlah rapat dewan direksi menunjukkan koefisien regresi positif sebesar 0.051 artinya setiap penambahan satu akan menaikkan pengaruh jumlah rapat dewan direksi sebesar 5.1 % dengan nilai signifikansi sebesar 0.045 lebih kecil dari taraf signifikansi, yaitu 5% (0.05). Maka hipotesis ke-5 berhasil membuktikan bahwa jumlah rapat dewan direksi berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report*.
  6. Variabel jumlah rapat komite audit menunjukkan koefisien regresi negatif sebesar -0.033 artinya setiap penambahan satu akan menurunkan pengaruh jumlah rapat komite audit sebesar 3.3% dengan nilai signifikansi sebesar 0.384 lebih besar dari taraf signifikansi, yaitu 5 % (0.05). Maka hipotesis ke-6 tidak berhasil membuktikan bahwa jumlah rapat komite audit berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report*.
  7. Variabel *governance committee* yang diukur dengan variabel *dummy* menunjukkan koefisien regresi positif sebesar 2.173 artinya setiap penambahan satu akan menaikkan pengaruh *governance committee* sebesar 217.3 % dengan nilai signifikansi sebesar 0.009 lebih besar dari taraf signifikansi yaitu 5% (0.05). Maka hipotesis ke-7 berhasil membuktikan bahwa *governance committee* berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report*.

Hasil output uji hipotesis dengan regresi logistik SPSS versi 16 diringkas dalam table.

**Tabel 4.9 Ringkasan Hasil Uji Hipotesis**

| No | Hipotesis | Keterangan  | Hasil                           |
|----|-----------|---|---------------------------------|
| 1  | H1        | Jumlah Anggota Dewan Komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan SR | Ditolak dengan sig. 0.904 >0.05 |

|   |    |  |                                  |
|---|----|--|----------------------------------|
| 2 | H2 | Proporsi Dewan Komisaris Independen berpengaruh terhadap pengungkapan SR | Ditolak dengan sig. 0.729 >0.05  |
| 3 | H3 | Ukuran Komite Audit berpengaruh terhadap pengungkapan SR                 | Ditolak dengan sig. 0.854 >0.05  |
| 4 | H4 | Jumlah Rapat Dewan Komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan SR        | Ditolak dengan sig. 0.322 >0.05  |
| 5 | H5 | Jumlah Rapat Dewan Direksi berpengaruh terhadap pengungkapan SR          | Diterima dengan sig. 0.045 <0.05 |
| 6 | H6 | Jumlah Rapat Komite Audit berpengaruh terhadap pengungkapan SR           | Ditolak dengan sig. 0.384 >0.05  |
| 7 | H7 | <i>Governance Committee</i> berpengaruh terhadap pengungkapan SR         | Diterima dengan sig. 0.009 <0.05 |

#### 4.4 Pembahasan

##### 4.4.1 Pengaruh Jumlah Anggota Dewan Komisaris Terhadap Pengungkapan *Sustainability Report*

Hasil output SPSS menunjukkan bahwa variabel dewan komisaris yang diukur dengan jumlah anggota dewan komisaris memiliki signifikansi sebesar 0.904. Angka tersebut lebih besar dari taraf signifikansi 5% (0.05). Berdasarkan hasil tersebut, maka  $H_0$  diterima, dan menolak  $H_a$ . Hasil ini menyatakan bahwa jumlah anggota dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *Sustainability Report*. Hasil ini menunjukkan bahwa pengawasan dewan komisaris terhadap pengelolaan perusahaan tidak tergantung pada besar kecilnya jumlah anggota dewan komisaris (Pratama, Yulianto, 2015).

Seperti pada teori tentang dewan komisaris pada landasan teori yang telah penulis tulis bahwa dewan komisaris tidak boleh turut serta dalam mengambil keputusan mengenai hal-hal yang telah ditetapkan dalam anggaran dasar atau peraturan perundang-undangan, pengambilan keputusan tersebut dilakukan

dalam fungsinya sebagai pengawas, sehingga keputusan kegiatan operasional tetap menjadi tanggung jawab direksi dan kewenangan yang ada pada dewan komisaris tetap dilakukan dalam fungsinya sebagai pengawas dan penasihat (Zarkasyi, 2008).

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ratnasari (2011) dan Idah (2013), menyebutkan bahwa ukuran dewan komisaris tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pengungkapan *sustainability report*. Pengawasan dewan komisaris tidak tergantung pada besar kecilnya ukuran dewan komisaris. Jumlah dewan komisaris yang terlalu besar akan membuat proses mencari kesepakatan dan membuat keputusan menjadi sulit dan panjang, sehingga dewan komisaris tidak dapat menjalankan fungsinya secara efektif (Muntoro dalam Ratnasari, 2010).

#### **4.4.2. Pengaruh Proporsi Dewan Komisaris Independen Terhadap Pengungkapan *Sustainability Report***

Hasil output SPSS menunjukkan variabel dewan komisaris independen yang diukur dengan proporsi dewan komisaris independen memiliki signifikansi sebesar 0.729. Angka tersebut lebih besar dari taraf signifikansi 5% (0.05). Berdasarkan hasil tersebut, maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak. Hasil ini menunjukkan bahwa angka proporsi dewan komisaris independen tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan *Sustainability report*.

Hasil penelitian tersebut sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Ratnasari (2010) dan Adiati (2014), yang menyebutkan bahwa proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report*.

Disamping itu, proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh dalam pengungkapan *sustainability report* mengindikasikan bahwa lemahnya pengawasan yang independen dan terlalu besarnya kekuasaan eksekutif. Dalam kaitannya dengan implementasi GCG di perusahaan, diharapkan bahwa keberadaan komisaris maupun komisaris independen tidak hanya sebagai pelengkap karena dalam diri komisaris melekat tanggung jawab secara hukum (yuridis). Namun, dalam praktik yang selama ini terjadi di Indonesia, terdapat kecenderungan bahwa komisaris sering kali melakukan intervensi terhadap direksi dalam menjalankan tugasnya. Sementara, di lain, kedudukan direksi biasanya sangat kuat, bahkan ada direksi yang enggan membagi wewenang serta tidak memberikan informasi yang memadai kepada dewan komisaris. Seagaimana yang kita ketahui, masalah independensi dan kapabilitas komisaris merupakan sesuatu yang sifatnya sangat mendasar (*fundamental*) (Effendi, 2009).

#### **4.4.3. Pengaruh Ukuran Komite Audit Terhadap Pengungkapan Sustainability Report**

Hasil output SPSS menunjukkan variabel Komite Audit yang diukur dengan Ukuran Komite Audit memiliki signifikansi sebesar 0.854. Angka tersebut lebih besar dari taraf signifikansi 5% (0.05). Berdasarkan hasil tersebut, maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak. Hasil ini menunjukkan bahwa angka Ukuran Komite Audit tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan *Sustainability report*.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan Ratnasari (2011) dan Anggraini, (2014). Berdasarkan penelitian, hasilnya mendukung teori yang didapatkan menurut Surat Edaran Bapepam Nomor. SE-03/PM/2000 tentang komite audit menjelaskan bahwa tujuan komite audit adalah membantu dewan komisaris untuk; meningkatkan kualitas laporan keuangan, menciptakan iklim disiplin dan pengendalian yang dapat mengurangi kesempatan terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan perusahaan, meningkatkan efektivitas fungsi internal audit

maupun eksternal audit, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian dewan komisaris (Effendi, 2009). Disamping itu, keberadaan komite audit merupakan sebuah keharusan, hal ini diatur dalam surat keputusan ketua BAPEPAM KEP 41/PM/2003, SK Dir. BEJ Nomor 315/BEJ/06 –2000, Keputusan Menteri BUMN Nomor 117/Tahun 2000, dan Undang-undang BUMN Nomor 19/2003. Peraturan tersebut dapat menimbulkan situasi dimana keberadaan komite audit menjadi kurang efektif, karena menjadi sekedar pelengkap untuk memenuhi peraturan yang berlaku.

#### **4.4.5 Pengaruh Jumlah Rapat Dewan Direksi Terhadap Pengungkapan *Sustainability Report***

Hasil output SPSS menunjukkan variabel dewan direksi yang diukur dengan jumlah rapat dewan direksi memiliki signifikansi sebesar 0.322. Angka tersebut lebih besar dari taraf signifikansi 5% (0.05). Berdasarkan hasil tersebut, maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak. Hasil ini menunjukkan bahwa jumlah rapat dewan komisaris tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan *Sustainability Report*.

Hasil penelitian tersebut konsisten dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ratnasari (2011) dan menolak hasil penelitian Anggraini, (2014) yang menyatakan bahwa jumlah rapat dewan komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan *Sustainability Report*. Hal ini terjadi karena rapat-rapat yang dilakukan oleh dewan komisaris kurang efektif, pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan NO.33/POJK.04/2014 Bab 3 pasal 31 menyatakan bahwa Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan. Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilangsungkan apabila dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Dewan Komisaris. Namun, pada praktiknya, sebagian besar perusahaan sektor tambang memiliki angka rapat dewan komisaris hanya sebanyak dua kali rapat dalam setahun.

#### **4.4.5 Pengaruh Jumlah Rapat Dewan Direksi Terhadap Pengungkapan *Sustainability Report***

Hasil output SPSS menunjukkan variabel dewan direksi yang diukur dengan jumlah rapat dewan direksi memiliki signifikansi sebesar 0.045. Angka tersebut lebih kecil dari taraf signifikansi 5% (0.05). Berdasarkan hasil tersebut, maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima yang menyatakan bahwa jumlah rapat dewan direksi berpengaruh terhadap pengungkapan *Sustainability report*. Hasil ini menunjukkan bahwa angka dewan direksi memiliki pengaruh terhadap pengungkapan *Sustainability Report*.

Hasil penelitian tersebut konsisten dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Suryono dan Prastiwi (2011) dan Idah (2014) menyatakan tugas tanggung jawab sosial yang dimiliki dewan direksi menjabarkan bahwa dewan direksi harus mempunyai perencanaan tertulis yang jelas dan fokus dalam melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Realisasi perencanaan tertulis yang jelas mengenai tanggung jawab perusahaan dapat dipublikasikan melalui *sustainability report*. Oleh karena itu, tanggung jawab sosial yang diungkapkan melalui *sustainability report* menegaskan bahwa perusahaan memperhatikan *stakeholder*-nya untuk mendapatkan legitimasi dari masyarakat.

Kinerja dewan direksi yang baik akan mampu mewujudkan *good corporate governance* bagi perusahaan. Dalam penerapannya, pelaksanaan *good corporate governance* sangat bergantung pada fungsi-fungsi dari dewan direksi yang dipercaya sebagai pihak pengurus perusahaan. Kemampuan dewan direksi dalam proses pengambilan keputusan mempunyai peranan yang besar bagi perusahaan. Oleh karena itu, frekuensi rapat antar anggota dewan direksi menyebabkan semakin seringnya komunikasi serta koordinasi antara anggota sehingga mempermudah dalam mewujudkan *good corporate governance* (Suryono dan Prastiwi, 2011).

#### **4.4.6 Pengaruh Jumlah Rapat Komite Audit Terhadap Pengungkapan *Sustainability Report***

Hasil output SPSS menunjukkan variabel komite audit yang diukur dengan jumlah rapat komite audit memiliki signifikansi sebesar 0.384. Angka tersebut lebih besar dari taraf signifikansi 5% (0.05). Berdasarkan hasil tersebut, maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak. Hasil ini menunjukkan bahwa angka jumlah rapat komite audit tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan *Sustainability report*. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Ratnasari (2011), dan Idah (2014), yang menyebutkan bahwa rapat komite audit tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap pengungkapan *sustainability report*.

Disamping itu, rapat komite audit adalah sebuah keharusan sesuai dengan keputusan Bapepam Nomor Kep-24/PM/2004 disebutkan bahwa komite audit mengadakan rapat sekurang-kurangnya sama dengan ketentuan minimal rapat dewan komisaris yang ditetapkan anggaran dasar perusahaan. Rapat dilaksanakan untuk melakukan koordinasi agar efektif dalam menjalankan pengawasan laporan dan pelaksanaan *corporate governance* perusahaan agar menjadi semakin baik (Suryono, 2011).

#### **4.4.7 Pengaruh *Governance Committee* Terhadap Pengungkapan *Sustainability Report***

Hasil output SPSS menunjukkan variabel *governance committee* yang diukur dengan variabel *dummy* memiliki signifikansi sebesar 0.009. Angka ini lebih kecil dari taraf signifikansi 5% (0.05). Berdasarkan hasil tersebut, maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima yang menyatakan bahwa *governance committee* berpengaruh terhadap pengungkapan *Sustainability Report*. Hasil tersebut menunjukkan bahwa angka *governance committee* memiliki pengaruh terhadap pengungkapan *Sustainability report*.



Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Idah (2013) yang menyatakan bahwa adanya pengaruh keberadaan *governance committee* terhadap publikasi *sustainability report*. *Governance committee* merupakan komite tambahan yang dibentuk oleh dewan komisaris yang terdiri dari beberapa anggota dewan direksi dalam mendukung pelaksanaan *good corporate governance* (Puspowardhani, 2013). Salah satu prinsip GCG yaitu *responsibility* mengharuskan perusahaan melakukan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan sebagai bentuk perhatian terhadap *stakeholder*-nya serta untuk mendapatkan pencitraan yang baik di mata masyarakat. *Governance committee* merekomendasikan pengungkapan tanggung jawab sosial melalui *sustainability report*.

Keberadaan *governance committee* memiliki hubungan dengan pengungkapan *sustainability report* suatu perusahaan. *Governance committee* dapat memberikan rekomendasi berupa inisiatif untuk melakukan pengungkapan sosial lingkungan yang lebih dalam mewujudkan salah satu prinsip *good corporate governance* yaitu *transparency* (Suryono, 21011). Hal tersebut diwujudkan dengan pengungkapan tanggung jawab sosial melalui *sustainability report* sebagai respon perusahaan akan tekanan dari publik maupun sebagai reaksi atas permintaan *stakeholders* (Dilling 2010, dalam Idah 2013).